



# Jurnal Demokrasi

Edisi April 2019

Bakesbangpol DKI Jakarta

## Tantangan Pemilu 2019 Perspektif, Analisis dan Antisipasi

Pemilu sebagai Implementasi Pancasila  
**Toto Sugiarto**

Pemilu Indonesia dan Tantangan Era Milenial  
**Desvian Bandarsyah**

Mencari Pemimpin dengan Survei  
**Ramdansyah**

Politik Uang di Pemilu 2019, Mitos atau Realitas?  
**Dian Permata**

Problematika Pemilu di Luar Negeri  
**Anis Hidayah**

Politik Identitas di Pemilu 2019  
**Lusi Andriyani**

Melawan Hoaks di Pemilu 2019  
**Mohammad Sirhan Bachmid**

Kerawanan Pemungutan  
dan Penghitungan Suara di Pemilu 2019  
**Achmad Fachrudin**

Penanganan Pelanggaran Pidana  
Pemilu 2019 di Jakarta  
**Muhammad Jufri**

Peran Politik Ulama di Pilkada DKI 2017  
**Habib**





# Jurnal Demokrasi

## Redaksi

### Pengarah

Drs. Taufan Bakri, M.Si  
*Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik Provinsi DKI Jakarta*

### Penanggungjawab

Drs. Entis Sutisna, M.Si  
*Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi DKI Jakarta*

### Dewan Redaksi

Mazhar Setiabudi, S.Sos, M.Si  
*Kasubid Demokrasi*

Drs. Tumpal Datner, MM  
*Kasubid Fasilitasi Kelembagaan Politik*

Handoko Mushestriaro, SKM, ME  
*Kasubid Pendidikan Budaya Politik*

Enylita Tobing, SE  
*Kesubag Keuangan*

### Distribusi

Lidya Silalahi  
*Staf Subid Demokrasi*

Rahmi, S.Sos  
*Staf Subid Pendidikan Budaya Demokrasi*

M. Jazuli, S. Kom. I  
*Staf Subid Fasilitas Kelembagaan Politik*

M. Noor Fadli

## Daftar Isi

Edisi April 2019

Pemilu sebagai Implementasi Pancasila <b>Toto Sugiarto</b>	7
Pemilu Indonesia dan Tantangan Era Milenial <b>Desvian Bandarsyah</b>	17
Mencari Pemimpin dengan Survei <b>Ramdansyah</b>	31
Politik Uang di Pemilu 2019, Mitos atau Realitas? <b>Dian Permata</b>	41
Problematika Pemilu di Luar Negeri <b>Anis Hidayah</b>	53
Politik identitas di Pemilu 2019 <b>Lusi Andriyani</b>	61
Melawan Hoaks di Pemilu 2019 <b>Mohammad Sirhan Bachmid</b>	69
Kerawanan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Pemilu 2019 <b>Achmad Fachrudin</b>	75
Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu 2019 di Jakarta <b>Muhammad Jufri</b>	87
Peran Politik Ulama di Pilkada DKI 2017 <b>Habib</b>	99

**Jurnal Demokrasi** mengundang dosen, peneliti, aktivis kepemiluan dan demokrasi, dan sebagainya untuk menyumbangkan pemikirannya di Jurnal ini. Panjang tulisan antara 4.000-5.000 kata, menggunakan font Times New Romance, 1,5 spasi, kertas ukuran A4, referensi/kepuustakaan dan lebih disukai hasil riset akademis. Naskah dikirim via email ke: [jurnalkesbangpol.dki@gmail.com](mailto:jurnalkesbangpol.dki@gmail.com)

**Alamat Redaksi:** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Gedung Balai Kota Blok H Lantai 15 Jl. Merdeka Selatan 909, Jakarta Pusat. Website: [bakesbangpoljakarta.com](http://bakesbangpoljakarta.com)

# Pemilu Indonesia dan Tantangan Era Milenial

Oleh  
**Desvian Bandarsyah**  
(Dekan FKIP Universitas Prof. Dr. Hamka)

Pemilu Indonesia berlangsung dalam perkembangan dunia yang cepat. Berbagai perubahan sangat cepat dan meluas dalam kehidupan global, perlu terus diperhatikan dan direspon secara serius oleh segenap bangsa Indonesia, melalui proses pembangunan budaya dan proses demokrasi di dalam masyarakat. Dengan demikian kita perlu mempersiapkan diri dengan baik, agar kehidupan bangsa di era milenial menyangkut generasinya dapat hidup dan melangsungkan kehidupan dengan baik di masa depan. Hal ini menjadi semakin penting karena kemampuan beradaptasi melalui respon berdemokrasi akan menentukan bagaimana kehidupan bersama sebagai bangsa dijalani oleh masyarakat Indonesia kini dan di masa depan. Oleh karena itu, pemaknaan demokrasi dan Pemilu Indonesia perlu diperlakukan sebagai proses menuju keadaban dalam konteks keragaman pilihan dan pandangan, menjadi penting dan mendesak dipahami dan dipraktikkan oleh semua pihak.

**Kata kunci:** *Pemilu, Indonesia, Tantangan, Era Milenial*

## A. Pengantar

Segenap masyarakat Indonesia tengah menunggu pesta demokrasi Indonesia yang akan diselenggarakan pada 17 April 2019 yang akan datang. Pesta itu dimaksudkan untuk memilih pemimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan, melalui Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg), tidak hanya akan menentukan nasib para kandidat presiden dan calon wakil rakyat yang tengah berkontestasi, tetapi juga menentukan corak dan masa depan bangsa ini di tengah berbagai perubahan dan perkembangan global yang semakin cepat dan kompleks. Kita tentu menyadari berbagai peluang dan

tantangan serta resiko pemilu kali ini menjadi sangat krusial bagi masa depan Indonesia.

Pemilu Indonesia diselenggarakan secara serentak dan melibatkan berbagai kepentingan anak bangsa serta melibatkan kepentingan antar generasi, terutama generasi X dan generasi milenial. Hal itu menggambarkan betapa kompleks dan rumitnya pelaksanaannya. Maka menjadi kepentingan segenap pihak, untuk melihat Pemilu Indonesia berjalan sukses dan menghasilkan kepemimpinan yang dapat menjembatani Indonesia melintasi periode satu abad perayaan kemerdekaannya.

Banyak harapan berbagai pihak

digantungkan dalam Pemilu kali ini. Hal ini disebabkan Pemilu berada dalam rentang waktu strategis pembangunan bangsa. Betapa tidak, dalam 15 tahun ke depan Indonesia akan menikmati puncak pertumbuhan usia penduduk produktif yang sangat fantastis, yang sudah dimulai awalnya sejak lima tahun belakangan ini. Kemudian, pembangunan infrastruktur tengah dilakukan dengan sangat masif oleh pemerintah, sebagai upaya untuk menggerakkan dan mendorong akselerasi pembangunan bangsa di masa depan. Maka Pemilu kali menjadi sangat strategis untuk melihat peluang dan tantangan keindonesiaan.

Meskipun proses yang berlangsung dalam Pemilu 2019 ini tidak selalu sejalan dengan harapan banyak pihak, hal itu disebabkan pemanasan suhu politik hampir mencapai titik puncaknya, akhir akhir ini, dan itu sudah dimulai sejak tahun-tahun awal hasil Pemilu presiden 2014 yang lalu. Sangat panjang sekali masa pemanasan ritual demokrasi dalam Pemilu terutama Pilpres di Indonesia. Ini menjadi sesuatu yang merugikan bagi pertumbuhan masyarakat dan negara, mengingat kesatuan menjadi variabel yang penting bagi setiap bangsa untuk membangun diri dan menatap masa depannya, tengah diuji melalui Pemilu. Sesuatu yang penting itu nyaris tergadaikan dalam kontestasi Pilpres kita.

Magnet Pilpres dalam dua tarikan Pemilu yang telah dan akan dilaksanakan memang luar biasa. Dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, emosi masyarakat dan bangsa ini diaduk-aduk oleh berbagai eskalasi politik yang terus meningkat oleh pernyataan dan kepentingan elite dan

kelas menengah dalam politik. Magnet itu semakin mendekati Pilpres, semakin kuat tarikannya dan cenderung direspon oleh mereka yang berkontestasi dengan berbagai cara dan strategi. Terkadang cara dan strategi itu entah disadari atau tidak oleh para pelakunya, berpotensi menimbulkan gesekan dan perpecahan di tingkat akar rumput.

Tentu saja kita menginginkan “kotak pandora” demokrasi dalam perspektif di atas tidak sampai terbuka dan meluluhlantakan bangunan kohesifitas sosial masyarakat kita yang memang tengah berada pada salah satu titik nadir paling rendah selama perjalanan sejarah bangsa ini. Jika itu tidak bisa dieleminir, maka pesta demokrasi dalam Pemilu kita menjadi suatu demokrasi yang absurd, karena dijalankan dengan menihilkan kebersamaan dan kesatuan bangsa.

Padahal sejatinya, Pemilu harus menjadi pilar penting dalam membangun demokrasi dan nilai-nilai kebangsaan kita yang plural, di tengah pertumbuhan generasi emas Indonesia yang mendambakan iklim kehidupan yang sehat bagi mereka. Generasi milenial yang hidup di era Revolusi Industri 4.0 perlu memiliki wadah bagi dalam mengembangkan berbagai potensi mereka, sehingga partisipasinya dalam membangun negara di masa depan dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya.

Dalam perspektif semacam itu, tulisan ini berupaya mengkaji Pemilu 2019 dengan segala tantangannya diharapkan dapat memberikan insentif bagi perkembangan generasi milenial bangsa. Bagaimana pendidikan kita memberikan kontribusi

bagi tumbuhnya generasi yang mandiri dan demokratis dalam menentukan pilihan secara otonom. Juga dapat menjadikan perekat dalam masyarakat untuk membangun *trust* dan *social capital* bersama yang menjadi dasar bagi penguatan ke-Indonesia-an kita di tengah perkembangan dan perubahan global yang semakin cepat dan kompleks.

## B. Perubahan Global dan Respon Kebangsaan

Abad ke-21 telah berjalan hampir dua dasawarsa, namun isu-isu utama yang mengiringinya ketika dunia memasuki abad ini masih juga relevan untuk dijadikan diskursus oleh berbagai kalangan, terutama di Indonesia. Gejala yang paling umum dan penting adalah menyangkut isu perubahan di berbagai belahan dunia yang mencakup dimensi struktural dan kultural dalam masyarakat dan bangsa, yaitu perubahan dunia yang berlarian dengan cepat membawa berbagai perubahan dan isu mendasar dan fundamental pada persoalan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta proses demokratisasi.

Perubahan ini berlangsung dengan cepat antara lain akibat pengaruh yang ditimbulkan oleh berakhirnya kontestasi politik global antara rejim Kapitalisme-Demokrasi Liberal dengan rejim Sosialisme-Komunisme yang diwakili oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa itu,<sup>1</sup> yang dimenangkan oleh rejim

<sup>1</sup> Untuk kajian mengenai berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan perpecahan Uni Soviet dan muncul ideologi Kapitalisme-Demokrasi Liberal dalam panggung politik global dapat dilihat pada: Zbigniew Brzezinski. 1992. *Kegagalan Besar: Muncul dan Runtuhnya Komunisme dalam Abad Keduapuluh*, Bandung: Remaja Rosda

Kapitalisme-Demokrasi Liberal. Situasi ini mendorong Kapitalisme-Demokrasi Liberal menjadi aktor utama yang mendorong proses perubahan global, regional, dan lokal diberbagai belahan dunia dalam menghadapi tatanan dunia baru (*new world order*), terutama pada persoalan demokrasi, sistem politik, ekonomi, budaya dan nilai nilainya.

Perubahan global ini jauh-jauh hari telah diingatkan beberapa tokoh futuristik terkenal, seperti Alvin Toffler, John Naisbitt dan Samuel P. Huntington, di awal-awal tahun 1990-an. Mereka memaparkan berbagai kemungkinan perkembangan dunia yang tidak semuanya selalu melaju seperti apa yang diharapkan, tetapi ada bagian-bagian lain yang menyimpang. Penyimpangan itu memberi konsekwensi yang tajam bagi kehidupan bersama manusia di muka bumi. Perubahan itu telah mendorong manusia dengan kehidupannya semakin sesak dengan kompetisi mengingat kehidupan semakin cepat dan berlarian dalam berbagai perubahan yang dramatis.

Hal itu disebabkan oleh ketidaksiapan sebagian besar masyarakat dengan produk budaya mutakhir yang lahir dari perkembangan yang begitu pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Informasi yang kecepatannya melebihi dari apa yang pernah dipikirkan oleh manusia sebelumnya. Kegagapan manusia

Karya; Francis Fukuyama. 2001. *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Yogyakarta: Qalam; Anthony Giddens. 2002. *Beyon left and Right: Tarian Ideologi Alternatif di atas Pusara Sosialisme dan kapitalisme*. Yogyakarta: IRCiSod; Anthony Giddens. 2000. *The Third Way: Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial*. Jakarta: Gramedia; Samuel Huntington. 2004. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta: Qalam.

menghadapi fenomena global yang sarat dengan berbagai konflik sosial ini diistilahkan oleh Toffler sebagai fenomena "guncangan kebudayaan". Fenomena ini digambarkan pada dua kecenderungan besar realitas masyarakat, yaitu sebagian bisa melaju ke arah peradaban baru, sedang sebagian lagi semakin terpuruk di belakang.

Masyarakat juga mengalami pengaruh dari situasi itu dan sekaligus berubah dalam arus deras perubahan. Lemahnya kemampuan beradaptasi dalam perubahan global, menentukan seberapa jauh ketertinggalan masyarakat dan bangsa dalam upaya menyesuaikan diri terhadap perkembangan budaya global. Maka konsekwensinya adalah semakin banyak masyarakat menjadi objek perubahan. Masyarakat lebih cenderung mengekor arus global ketimbang menjadi penentu perubahan. Sebaliknya, jika tidak gagap dengan arus global, masyarakat dimungkinkan dapat menguasai kesempatan bekerja sama antar sesama umat manusia di muka bumi serta semakin memberikan harapan untuk mampu bersaing di kancah masyarakat internasional.

Berbagai perubahan sangat cepat dan meluas ini perlu terus diperhatikan dan direspon secara serius oleh segenap bangsa Indonesia, melalui proses pembangunan budaya dan proses demokrasi di dalam masyarakat. Dengan demikian kita perlu mempersiapkan diri dengan baik, agar kehidupan bangsa di era milenial menyangkut generasinya dapat hidup dan melangsungkan kehidupan dengan baik di masa depan. Ia menjadi semakin penting karena kemampuan

berdaftasi melalui respon berdemokrasi akan menentukan bagaimana kehidupan bersama sebagai bangsa dijalani oleh masyarakat Indonesia.

Kegagalan merespon berbagai perubahan dalam lanskap kepentingan bersama, dapat memberi konsekwensi bagi melemahnya ikatan sosial sebagai masyarakat bangsa yang berujung pada melemahnya daya saing bangsa di tengah percaturan global. Maka Pemilu Indonesia yang dimaksud untuk memilih elite kepemimpinan bangsa, sebagai upaya kolektif bangsa ini dalam menjaga amanah Indonesia yang diwariskan para pendahulunya, perlu direspon dengan serius dan bertanggungjawab. Hanya dengan cara itu, Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dari bangsa lain dan bahkan dapat berkembang menjadi bangsa besar, sebagaimana diramalkan oleh berbagai lembaga-lembaga riset internasional tentang masa depan Indonesia. Karena diyakini, proses demokrasi yang berjalan dengan baik dan bertanggungjawab dalam Pemilu kita akan memberikan insentif bagi kemunculan elite kepemimpinan nasional yang dapat membawa bangsa ini menjadi bangsa besar di masa depan.

Demokrasi kita, sejatinya diselenggarakan dan dimaksudkan untuk tujuan tujuan yang dapat memberikan kepastian bagi pembangunan Indonesia, baik manusianya maupun infrastruktur sosial, politik, dan ekonomi serta budayanya. Dengan demikian, demokrasi kita dalam penyelenggaraannya perlu memperhatikan kepentingan aspek etis dan kepentingan bangsa yang lebih luas, yang menjangkau proses dan tujuan memakmurkan dan memberi ketenangan

bagi masyarakat luas tanpa membedakan dan mempersoalkan pilihan pilihan yang diambilnya.

Itulah sejatinya, makna dari seruan Bung Hatta, pada Malumat No. X tahun 1945, agar segenap masyarakat berpartisipasi dalam Pemilu dengan mendirikan partai politik.<sup>2</sup> Agar partai politik memberikan sumbangan bagi Indonesia melalui peran partai politik dalam proses demokratisasi di negara yang baru merdeka ketika itu. Meskipun Pemilu yang di maksudkan Hatta tidak pernah dilangsungkan sampai tahun 1955. Seruan Hatta itu sejalan dengan kepentingan, bahwa untuk melaksanakan demokrasi, diperlukan partai politik sebagai pilar atau elemen utama dalam berdemokrasi. Untuk itu, partai politik harus sehat dalam menjalankan fungsi dasar, yaitu *pertama*, rekrutmen politik (termasuk promosi dan degradasi); *kedua*, pemenangan politik (untuk berkuasa dan menata sumber daya alam, manusia, dan sosial, demi kepentingan publik); *ketiga*, pendidikan politik (bagi kader dan publik); *keempat*, fungsi komunikasi politik dalam arti luas, namun esensinya mendengar aspirasi publik.<sup>3</sup>

Partai politik yang sehat mendorong pertumbuhan budaya politik yang kuat. Satu budaya yang dijalankan atas prinsip moral etis kebangsaan, bukan moral politik sempit berbasis kepentingan kelompok yang pragmatis semata. Ini menjadi penting, di tengah perkembangan masyarakat kita yang mengalami pubertas demokrasi.

Pemilu dan demokrasi kita memang

2 Lihat: MC. Ricklefs. 1995. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

3 David E. Apter. 1987. *Politik Modernisasi*. Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 32.

memberikan gambaran yang kuat pada sikap berdemokrasi masyarakat luas hari ini. Masyarakat kita cenderung belum mampu melakukan proses adaptasi terkait dengan persebaran informasi yang cepat di era teknologi informasi, sehingga menjadi gagap dalam menyebarkan berbagai informasi terkait pilihan dan dukungan dalam Pemilu. Sedemikian gagapnya, segala informasi yang cenderung menguntungkan calon presiden yang akan dipilihnya, disebar tanpa menyaring, apakah info yang disebar itu benar atau tidak, mengandung informasi menyesatkan dan memecah belah atau tidak, bahkan bisa jadi dapat memprovokasi orang lain atau tidak, bukan menjadi pertimbangan yang penting dan serius, yang penting adalah proses mendiseminasi dan menyebarluaskan informasi. Mereka meyakini bahwa menyebarkan informasi menjadi bagian dari eksistensi yang dapat mendorong elektabilitas dan kemenangan calon presiden yang akan dipilihnya.

Padahal, tindakan yang dilakukan secara kolektif dan massal itu, telah mendorong terjadinya eskalasi verbal dalam bentuk kata kata yang saling menihilkan satu sama lain di media sosial. Dalam konteks keberpihakan mereka pada calon dan pilihannya, tidak jarang situasi itu juga berkorespondensi dengan realitas dalam masyarakatnya. Maka masyarakat menjadi terbelah dengan pilihannya. Keterbelahan itu semakin memuncak ketika Pemilu semakin mendekat.

Demokrasi sejatinya adalah konsolidasi dalam memilih pemimpin yang dilandasi rasa hormat dan nilai etik pada berbagai pilihan yang sama dan berbeda di

antara para pemilih dalam masyarakat. Demokrasi merupakan proses menuju keadaban dalam konteks keragaman pilihan dan pandangan. Ia menjadi cara dalam membangun spirit berkompetisi dan berkolaborasi secara beradab untuk memenuhi harapan segenap anak bangsa. Inilah respon utama yang harus diberikan oleh proses demokrasi dan Pemilu bagi daya tahan dan eksistensi Indonesia di tengah persaingan bangsa-bangsa di dunia.

Semua anak bangsa dan terutama para elite dan masyarakat terdidik memiliki tanggungjawab untuk menjalankan fungsi sosial politik sebagai individu dan sebagai bagian dari masyarakat warga dalam proses yang berlangsung itu. Ketika kaum elite dan masyarakat tidak menjalankan fungsi semacam itu dan bahkan menjadi bagian yang menjalankan perilaku yang berlawanan dengan fungsi semacam itu, maka diyakini keterbelahan masyarakat bukan hanya menjadi realitas yang tidak dapat dihindari, tetapi keterbelahan itu semakin tajam dan mendalam yang dapat menghancurkan masyarakat dan bangsa. Tesis ini menjadi benar karena secara empirik tengah berlangsung dan secara teoritik masyarakat sesungguhnya cenderung mengikuti role model yang ada di sekitar mereka. Role model itu antara lain adalah para elite dan kaum terdidik, yang memang menjadi panutan pada masyarakat kita yang masih kuat dibalut oleh nilai dan paham feodalisme-bapakisme.

Demikianlah, respon kebangsaan kita terhadap perkembangan global, jika dikaitkan dengan kepentingan Pemilu kita kali ini. Tantangan global semakin

kuat dan mendesak bagi munculnya respon kebangsaan yang kuat. Elite kita perlu mencermati berbagai perubahan global dalam konteks proses demokrasi. Demokrasi perlu menjadi bagian yang menguatkan ide-ide kebangsaan. Keberadaan generasi milenial sebagai pemilih terbesar dalam Pemilu kita perlu diperkuat partisipasinya dalam berdemokrasi dengan pemahaman dan kesadaran yang kuat, sehingga mereka dapat memutuskan pilihannya dengan baik dan bertanggungjawab. Itulah respon kebangsaan yang diharapkan muncul dari segenap stakeholder dalam Pemilu Indonesia yang akan dilangsungkan sebentar lagi.

### **C. Pendidikan dan Pemilu**

Generasi kita hari ini hidup dalam era milenial dengan segenap tantangan dan kompleksitas persoalannya. Berbagai hasil lembaga pemeringkatan terhadap generasi Indonesia dan sumber daya manusianya menggambarkan posisi Indonesia yang rendah daya saingnya pada tingkat dunia. Hal itu disebabkan karena rendahnya kinerja pendidikan kita. Maka realitas ini perlu direspon oleh pendidikan kita dengan mempersiapkan infrastruktur dan suprastruktur pendidikan yang baik.

Pendidikan sebagaimana juga kebudayaan suatu bangsa seharusnya memberikan kesempatan kepada generasi mudanya untuk mengembangkan dan mempersiapkan diri guna menghadapi tantangan dan perkembangan zaman yang selalu berubah. Krisis pendidikan dan kebudayaan berdampak pada krisis di segala bidang. Hal ini dikarenakan kerusakan pendidikan mempengaruhi



tatanan sosial yang lain, termasuk cara berinteraksi anak bangsa dalam berdemokrasi. Di lain pihak, heterogenitas bangsa Indonesia ibarat pedang bermata ganda. Di satu sisi kemajemukan dapat menjadi kekuatan konstruktif-produktif dalam rangka membangun bangsa, tapi di sisi lain dapat menjadi faktor perpecahan.

Itulah yang tengah kita hadapi sekarang ini. Bagaimana pendidikan kita yang lemah, telah menyebabkan lemahnya bangsa dan negara dalam mengurus dirinya, terutama dalam berdemokrasi dan melaksanakan Pemilu akhir-akhir ini. Berbagai persoalan pendidikan telah mempengaruhi tatanan sosial dan interaksi sosial serta kebudayaan masyarakat bangsa kita. Berbagai indikator menjadi persoalan yang semakin nyata dan berkembang menjadi fakta. Indonesia sakit, dengan penyakit yang menjalar secara leluasa dalam tubuhnya. Persoalan demokrasi yang dimaknai secara keliru akibat lemahnya pendidikan politik bangsa, korupsi yang meluas, kejahatan sosial dan maraknya peredaran narkoba, telah memberikan kedalaman bagi penyakit dan persoalan bangsa secara serius.

Maka generasi milenial kita semakin rentan oleh berbagai gangguan. Inilah tantangan nyata bagi pendidikan anak bangsa di masa kini dan masa depan, yang disebabkan oleh persoalan struktural dan kultural pendidikan kita sejak masa lalu. Ini yang perlu dibenahi dengan serius. Bagaimana pendidikan dapat mendorong percepatan pembangunan etos bangsa di tengah semakin sengitnya kehidupan dunia. Bagaimana pembangunan kita melalui rekayasa SDM nya dapat memberikan benefit terhadap pertumbuhan manusia Indonesia yang

kuat sejahtera dengan nilai demokratis dan etika sosial yang kokoh pada dirinya.

Ketika Orde Baru mengendalikan keadaan nasional dengan meyakinkan pada awalnya, melalui kebijakan "ideologi pembangunan", ia menjalankan misi "membangun manusia Indonesia seutuhnya" dengan "serampangan". Karena orientasi pembangunan direduksi dalam kepentingan kekuasaan yang mengarah pada absolutisme. Ide-ide pembangunan ekonomi mendominasi kehidupan masyarakat Indonesia tanpa reserve, melalui praktik rente, *moral hazard*, dan budaya feodalistik yang mengakar kuat dalam sebagian besar tradisi kekuasaan di Indonesia hingga saat ini. Maka mudah untuk ditebak ujung dari situasi semacam itu sebagaimana sejarah memvonisnya, tidak berbeda jauh dengan ujung dari Orde Lama, yaitu bencana bagi Indonesia dan manusianya. Bahkan ini lebih dahsyat lagi dan nyaris sempurna, karena bukan hanya kehancuran ekonomi, tetapi juga kehancuran etos dan mentalitas manusia Indonesia yang mengarah pada pragmatis, hedonis, dan apolitis serta ahistoris.<sup>4</sup>

4 Untuk kajian ini dapat dilihat dalam: Moehtar Masoed. 1991. Struktur Ekonomi Politik Orde Baru. Jakarta: LP3ES; Thomas Linblad. 2002. Pondasi Hitoris Ekonomi Indonesia. Jakarta: Gramedia.; Eep Saefulloh. 2003. Cacatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sejarah mencatat bahwa di era Orde Lama, terutama sejak tahun 1957 yang ditandai dengan pemberlakuan Sistem Politik Terpimpin di segala bidang, tekanan pada pembangunan manusia Indonesia dititikberatkan lebih pada persoalan ideologis-politis, yang berujung pada kebangkrutan Indonesia dan Peristiwa 30 September 1965. Hal itu disebabkan karena tidak terselenggarakannya dua pendekatan dalam model Pembangunan Indonesia, yaitu Ideologis-Politis dan Pragmatis-ekonomis. Untuk kajian ini, lihat: Albert Widjaya. 1982. Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: LP3ES.; H.W. Arndt (penyunting). 1987. Pembangunan dan Pemerataan: Indonesia di Masa Orde Baru. Jakarta: LP3ES.; Moehtar Masoed, Op.

Singkat kata, gagal pembangunan itu. Hal ini tercermin dalam era reformasi yang segalanya diukur dengan materi (uang). Manusia menjadi tak bernilai, karena harga diri dan rasa malu diintervensi dengan sedemikian brutal dan keji. Itulah pembangunan Orde Baru, yang “berhasil” melumpuhkan bangunan kesadaran ke-Indonesiaan manusiannya, menghancurkan sumber-sumber kekayaan alam Indonesia, juga menjungkirbalikan norma dan etika serta kewajaran Indonesia.

Namun secara sosiologis-historis kondisi sosial yang timpang tersebut dapat dilacak jauh sebelumnya, ketika pemerintah Indonesia mulai menapakkan langkah tunggalnya dalam bidang ekonomi dengan konsep “negara pembangunan”, yang mengabaikan faktor penyeimbang lainnya, seperti politik, kebudayaan, agama, dan sebagainya sejak akhir dasawarsa 1960-an.

Perubahan yang terjadi pada manusia Indonesia ditandai dengan bergesernya ciri masyarakat agraris yang lebih berorientasi pada *komunalisme* kepada ciri masyarakat industrialis yang berorientasi pada *individualisme*, yang mengakibatkan kontrol sosial mengalami pergeseran dari nilai dan fungsinya.<sup>5</sup> Ini disebabkan perubahan tersebut tidak dibarengi dengan kesiapan manusia Indonesia untuk menyongsong seperangkat nilai-nilai baru yang secara inheren terdapat dan harus dimiliki pada masyarakat industri. Dengan kata lain modernisasi hanya berjalan pada tataran simbolis dan

Cit.

5 Irwan Abdullah, “Kondisi Sosial yang Dibayangi Disintegrasi Tanpa Ujung”, dalam: Jakob Oetama (peng). 2000. *Indonesia Abad XXI Di Tengah Kepungan Perubahan Global*, Jakarta: KOMPAS, hal. 45.

tidak pada tataran substansif *maind-set* atau arus besar pemikirannya. Maka tidak mengherankan jika hal itu melahirkan berbagai problem sosial pada manusia Indonesia yang diakibatkan kemacetan dalam menginternalisasikan nilai-nilai yang terdapat pada budaya masyarakat industri.

Industrialisasi yang tumbuh dengan pesat di Indonesia setelah modal asing masuk ke Indonesia pada akhir dasawarsa 1960-an telah mendorong mobilitas sosial berkembang ke arah yang lebih kompleks.<sup>6</sup> Munculnya berbagai perilaku sosial baru sebagai cermin dari perubahan pola dan sistem sosial dari masyarakat agraris kepada masyarakat industrialis menyebabkan mobilitas sosial pada masyarakat mengalami konflik yang serius. Terjadi benturan nilai-nilai yang terwakili pada dua kutub, yaitu nilai-nilai tradisional yang identik dengan pola agraris dan nilai-nilai modernitas yang identik dengan pola industrialis. Posisi yang saling bertentangan di antara kedua nilai-nilai tersebut perlu dijembatani melalui suatu proses transformasi sosial dalam masyarakat Indonesia, sayangnya transformasi sosial yang berjalan mengalami tantangan dan hambatan, akibat ketidaksiapan masyarakat dan nagara serta moral hazard dari kekuasaan yang mengkangkangnya.

Inilah pangkal dari kehancuran

6 Modal asing masuk ke Indonesia sebagai konsekwensi diterapkannya pembangunan ekonomi jangka panjang, yang membutuhkan dukungan devisa besar. Hal ini dilakukan mengingat kesenjangan devisa yang dialami pemerintah Indonesia terjadi cukup parah akibat warisan perekonomian yang kacau balau pada pertengahan 1960-an. Kebijakan tentang modal asing pada waktu itu diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1967. Untuk lebih jelas lihat: Dep. Penerangan R.I. 2000. *Pedoman Kabinet Ampera*, Buku I, Jilid 14, hal. 697-708.

moralitas Indonesia. Dalam situasi chaos secara kultural, gagasan pragmatisme dan materialisme masuk melalui ide-ide pembangunan, maka muncul seperangkat mentalitas manusia Indonesia yang "menghamba" pada penguasaan materi melalui cara-cara yang menyimpang (baca: korupsi, kolusi, nepotisme, (KKN) dan berbagai tindak kekerasan lainnya) yang sering membuat individu yang sadar dan bajik dalam republik ini terkejut-kejut.

Sebagai refleksi dari kondisi tersebut, misalnya masyarakat semakin sensitif terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah mereka. Sikap saling curiga dan tidak lagi menghargai keberadaan orang lain menjadi semakin meluas. Hal ini mengakibatkan munculnya sikap yang melegalkan tindakan dari setiap individu atau kelompok masyarakat dengan mengambil berbagai perilaku sosial yang menyimpang dalam bentuk tindakan kekerasan.

Perubahan sosial semacam itu yang bergerak ke arah kutub negatif, sesungguhnya bisa dieliminir, mengingat bahwa pembangunan di negara manapun selalu memunculkan eksekutif negatif, namun lemahnya pendekatan *nation and character building* dan politik pendidikan yang dijalankan negara pada masa itu, telah mengakibatkan generasi bangsa kehilangan momentum untuk mendapatkan pendidikan karakter dan pendidikan politik yang memadai.

Kita tidak bisa lagi mengulang perlakuan kekuasaan dan masyarakat terhadap pendidikan kita yang lemah dan hanya dijadikan alat untuk memperkuat kekuasaan semata. Pendidikan kita

karena secara nomenklatur disebut pendidikan nasional dan misinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu dijalankan oleh semua pihak untuk menumbuhkembangkan kesadaran nasional, semangat nasionalisme, nilai-nilai humanis, sikap toleransi, dan kehidupan bersama. Itulah sejatinya makna pendidikan kita. Maka pendidikan dan pembangunan bangsa perlu dirumuskan dan dilaksanakan atas prinsip dan kesadaran semacam itu. Pendidikan yang memberi spirit keindonesiaan bagian anak bangsa, yang memberi kepastian bagi keberlanjutan dan penguatan keindonesiaan kita. Cukupilah bangsa ini membuang waktu dengan apologia sempit dan menyesatkan yang menghasilkan keterbelahan generasi dengan bangsanya, yaitu sikap pragmatis-materialistis dan ego kelompok yang kuat. Itu yang membuat kita banyak kehilangan daya saing sebagai bangsa di antara bangsa-bangsa lain di dunia.

Kita perlu menjalankan tugas-tugas pendidikan bagi anak bangsa dengan balutan kesadaran akan kepentingan dan masa depan bangsa. Bagaimana generasi milenial yang tumbuh menjadi bagian dari peluang besar demografi Indonesia untuk bangkit di masa depan, perlu dimaknai dan direspon dengan benar. Bonus Demografi tengah menghampiri bangsa kita. Akan ada 180 juta manusia Indonesia yang produktif, yang dapat menjadi lokomotif bagi pembangunan bangsa. Mereka akan menggerakkan pembangunan nasional Indonesia dalam kurun waktu yang panjang. Kita memiliki peluang dan optimisme untuk menjadi bangsa yang besar. Beberapa lembaga riset dunia memprediksi Indonesia akan

menjadi negara dengan besaran ekonomi nomor tujuh, enam, bahkan ke-lima di dunia. Sungguh gambaran yang harus direspon oleh bangsa ini dengan serius dan berkesungguhan.

Inilah era Revolusi Industri 4.0. Era di mana kekuatan-kekuatan besar korporasi global digerakan oleh satu, dua atau tiga tangan saja melalui benda ajaib modernitas, remote control, baik yang bersifat mekanis maupun yang bersifat sosio kultural. Era ini ditandai dengan tidak berdayanya massa dalam jumlah yang masif karena berada dalam kekuasaan "invisible hand" yang bekerja siang dan malam dalam membangun kerajaan bisnis dan politik kebudayaannya. Era ini membutuhkan keterampilan nalar dalam berpikir yang dijejali dengan ilmu pengetahuan, ilmu kealaman, keilmuan kemanusiaan, dan juga ilmu ketuhanan. Ditunggu kepiawaian umat dan elite dalam mengembangkan kekuatan generasi milenial di era semacam ini.

Bagaimana kemudian, berbagai aktifitas manusia lenyap tergantikan dengan aktifitas baru dalam persoalan ekonomi dan budaya, perlu menjadi bagian kesadaran yang terintegrasikan dalam gerakan keumatan. Kita perlu mengenali dan memahami fenomena itu sebagai lawan-lawan di era digital. Perlu kemahiran baru dalam merespon lawan semacam itu. Tidak bisa bergelut dalam "kubangan" yang sama dan berlama lama di sana, karena hal itu tidak lain hanya akan membuat umat semakin tertinggal.

Jangan mudah terpuak dengan fenomenayang nampak, karena cenderung

mengecoh, demikian kata dan keyakinan aliran fenomenologi. Tapi lihat, apa dan bagaimana serta mengapa yang bergerak dalam fenomena itu berlangsung. Karena setiap fenomena selalu mensyaratkan noumena. Noumena dikaji dan di pahami. Agar langkah menjadi berarti.

Gerakan membangun bangsa dengan sistematis dan sistemik, terkoordinasikan dan terhubung dengan baik dengan dimensi kebudayaan, dengan dimensi politik ekonomi, dengan dimensi dan wacana global, diperlukan. Agar masyarakat memiliki basis pijakan dalam dunia kekinian dengan lengkap. Memiliki spirit berbangsa yang didasarkan pada nilai transenden dan nilai profan keduniawian yang mampu menopang dirinya dan eksistensi kediriannya dengan kokoh dalam arus jaman yang cepat berubah. Singkatnya betapa pentingnya pendidikan kita.

## D. Trust dan Social Capital

Pemilu Indonesia pada aspek lain dihadapkan dengan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat, kemajemukan. Masyarakat Indonesia secara sosiologis sesungguhnya mengidap bahaya laten untuk berkonflik, karena perbedaan yang terdapat di antara masyarakat. Hasil studi Nasikun menggambarkan hal demikian.<sup>7</sup> Jadi tanpa ada problema yang serius, konflik sosial sewaktu waktu dapat muncul. Ini disebabkan perbedaan dan keragaman yang secara *build up* memang dimiliki oleh masyarakat bangsa ini. Di tengah modal sosial bersama yang semakin rendah dalam menjalankan dinamika kehidupan

<sup>7</sup> Nasikun. 2006. Struktur Sosial Masyarakat Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, hal. 49.

berb... yang semakin kompleks, konflik menjadi semakin laten dan rentan terjadi. Pemilu Indonesia, memberikan gambaran nyata akan tesis itu. Bagaimana perbedaan memilih di antara masyarakat, menjadi sangat tajam karena dipengaruhi oleh cara pandang yang berbasis pada perbedaan agama, suku, golongan dan kepentingan lainnya.

Sebuah bangsa untuk menjadi satu secara berkelanjutan memerlukan *trust* yang dibentuk dari *social capital* yang dapat mengikatnya. Masyarakat Indonesia, secara historis menjadi bagian dari Indonesia, diikat oleh persamaan nasib dan semangat nasionalisme yang mengiringinya sejak era kolonial. Modal sosial ini yang menjadikan Indonesia tetap eksis meski sejarah panjang perjalanannya banyak diwarnai oleh ketidakadilan dan berbagai pemberontakan serta krisis ekonomi. Sesungguhnya, modal sosial masyarakat bangsa ini nyaris bangkrut karena digunakan oleh berbagai rejim kekuasaan masa lalu untuk meredam segala ketidakpuasan yang disebabkan oleh kegagalan atau sekurangnya pembangunan yang belum berhasil mengayomi lapisan masyarakat luas.

Di tengah *social capital* yang semakin menipis dan kompleksitas persoalan yang semakin memuncak, serta tarikan kehidupan dalam persaingan global yang semakin sengit, maka menjadi kepentingan bersama yang mendesak untuk mengembangkan *social capital* yang dapat meningkatkan daya saing bangsa. Pemilu kita perlu diselenggarakan dalam semangat mengembangkan *social capital* bangsa dengan. Bagaimana masyarakat sebagai individu yang memiliki nilai utama,

mampu mengambil keputusan dalam ragam perbedaan secara otonom dan bertanggungjawab yang dilandasi nilai etik kebangsaan, yaitu dalam kerangka menjaga kehidupan bersama dengan penuh tanggungjawab. Itulah nilai utama yang perlu ditumbuhkan oleh sistem demokrasi kita dan Pemilu kita melalui peran partai politik dan pemerintah dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan perilaku berdemokrasi dengan pilihan-pilihan bertanggungjawab dan memunculkan nilai positif di antara kehidupan bersama mereka.

Keterbelahan masyarakat bukan perkara remeh temeh dalam geneologi masyarakat majemuk seperti Indonesia. Karena masyarakat majemuk itu sesungguhnya mengidap bahaya laten untuk berkonflik. Tanpa ada problema yang serius menjadi pemicu, konflik sosial sewaktu waktu dapat muncul dan meledak. Karena masyarakat, akibat perbedaan dalam keragaman, seperti ranting kering yang mudah terbakar oleh sulutan api kecil. Maka jika ada situasi yang memprovokasi, masyarakat akan dengan mudah meledak. Ini tentu saja ditopang oleh persoalan ekonomi politik yang saling berkelindan dalam dinamika dan isu sosial-politik yang semakin eskalatif dan masif.

Analisis lainnya, yang mendorong tesis di atas adalah variabel *social capital* masyarakat kita. Bahwa dalam masyarakat yang mengidap bahaya laten konflik semacam masyarakat Indonesia, biasanya *social capital* menjadi barang yang mahal. Masyarakat Indonesia, secara historis menjadi bagian dari Indonesia, diikat

oleh persamaan nasib dan semangat nasionalisme yang mengiringinya sejak era kolonial. Modal sosial ini yang menjadikan Indonesia tetap eksis meski sejarah panjang perjalanannya banyak diwarnai oleh ketidakadilan dan berbagai pemberontakan serta krisis ekonomi. Sesungguhnya, *social capital* masyarakat bangsa ini nyaris bangkrut karena digunakan oleh berbagai rejim kekuasaan masa lalu untuk meredam segala ketidakpuasan yang disebabkan oleh kegagalan atau sekurangnya pembangunan yang belum berhasil mengayomi lapisan masyarakat luas.

Maka sesungguhnya, perang kata kata yang dibumbui hoaks juga fitnah melalui persebaran informasi di dunia medsos dalam mendukung calon presiden yang akan dipilihnya, yang berlangsung semakin masif dan eskalatif telah menjadikan masyarakat terbelah pada dua pilihan yang tajam. Tidak ada alternatif lain dari pilihan itu, disebabkan informasi dikemas dengan sangat ketat, baik diksi maupun substansinya. Muatan substansinya bahkan merambah ke berbagai daerah sensitif kebangsaan dan keagamaan. Ini yang dimaksudkan sebagai situasi yang tidak remeh temeh lagi. Sangat serius.

Politik kita hari ini, perlu dengan cermat memperhitungkan variabel *trust* dan *social capital* di tengah masyarakat dan bangsa yang semakin menipis. Saling menihilkan antar kelompok yang berkontestasi dalam Pilpres bisa membawa bangsa ini ke dalam perpecahan yang semakin dalam. Sementara kanal kanal yang dapat menyalurkan dan menetralsir perpecahan semakin sulit diandalkan bahkan ditemukan. Konsekwensinya,

masyarakat semakin mengeluarkan biaya sosial yang mahal dalam menjalani kebersamaan dalam kehidupan sosialnya. Dalam konteks itu, Francis Fukuyama mengatakan bahwa, semakin tinggi modal sosial yang dimiliki suatu masyarakat, maka semakin efisien masyarakat dalam menjalani kehidupan bersama. Sebaliknya, semakin rendah modal sosial yang dimiliki masyarakat, akan semakin mahal masyarakat mengembangkan kehidupan bersama.<sup>8</sup>

Di tengah modal sosial yang semakin menipis dan kompleksitas persoalan yang semakin memuncak, serta tarikan kehidupan dalam persaingan global yang semakin sengit, maka kontestasi Pilpres yang akan dilaksanakan oleh bangsa ini hendaknya menjadi kepentingan bersama yang ditujukan untuk mengembangkan modal sosial dan daya saing bangsa melalui proses pendewasaan masyarakatnya dalam menjalankan praktek demokrasi dengan nilai utama untuk mengambil keputusan dalam ragam perbedaan secara otonom dan bertanggungjawab

8 Penggunaan istilah *social capital* untuk pertama kalinya dikenalkan oleh Lyda Judson Hanifan pada tahun 1916 untuk menggambarkan pusat-pusat sekolah desa. Perkembangan lebih luas dari istilah ini digunakan oleh sosiolog James Coleman dan Robert Putnam yang merangsang debat mengenai peran *social capital* dalam masyarakat di Italia dan Amerika Serikat. Penelitian Fukuyama tentang masalah ini dilakukan di Amerika Serikat dengan mengambil setting waktu tahun 1990-an. Penelitiannya menggambarkan kehancuran tatanan sosial masyarakat di Amerika Serikat yang diwakili oleh meningkatnya kriminalitas, kepercayaan menipis, keluarga berantakan, dan individualisme mengalahkan komunitas. Francis Fukuyama, *The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial*, Qalam, Yogyakarta, 2002, hal. 22. Untuk pembahasan teoretik yang sejenis lihat juga: Robert W. Hefner, *Islam dan Demokrasi di Indonesia: Civil Islam*, Institut Studi dan Arus Informasi, Yogyakarta, 2001, terutama pada bab 2.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan. "Kondisi Sosial yang Dibayangi Disintegrasi Tanpa Ujung", dalam: Oetama, Jakob (peng). 2000. *Indonesia Abad XXI Di Tengah Kepungan Perubahan Global*, Kompas, Jakarta.
- Apter, David E. 1987. *Politik Modernisasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Arndt, H.W. (penyunting). 1987. *Pembangunan dan Pemerataan: Indonesia di Masa Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Brzezinski, Zbigniew. 1992. *Kegagalan Besar: Muncul dan Runtuhnya Komunisme dalam Abad Keduapuluh*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Dep. Penerangan R.I. 2000. *Pedoman Kabinet Ampera*, Buku I, Jilid 14.
- Fukuyama, Francis. 2001. *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Yogyakarta: Qalam.
- \_\_\_\_\_, 2002. *The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatahan Sosial*. Yogyakarta: Qalam.
- Giddens, Anthony. 2002. *Beyon left and Right: Tarian Ideologi Alternatif di atas Pusara Sosialisme dan kapitalisme*. Yogyakarta: IRCiSod.
- \_\_\_\_\_, 2000. *The Third Way: Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Hefner, Robert W., *Islam dan Demokrasi di Indonesia: Civil Islam*, Institut Studi dan Arus Informasi, Yogyakarta, 2001.
- Huntington, Samuel. 2004. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta: Qalam.
- Linblad, Thomas. 2002. *Pondasi Hitoris Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Masoed, Moehtar. 1991. *Struktur Ekonomi Politik Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Nasikun. 2006. *Struktur Sosial Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ricklefs, MC. 1995. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Saefulloh, Eep. 2003. *Cacatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaya, Albert. 1982. *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.